

**DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH KABUPATEN/ KOTA DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

RINGKASAN SKRIPSI



Disusun Oleh:

Linda Rohyani

1118 30533

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
JUNI 2022**

TUGAS AKHIR

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/ KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

LINDA ROHYANI

Nomor Induk Mahasiswa: 111830533

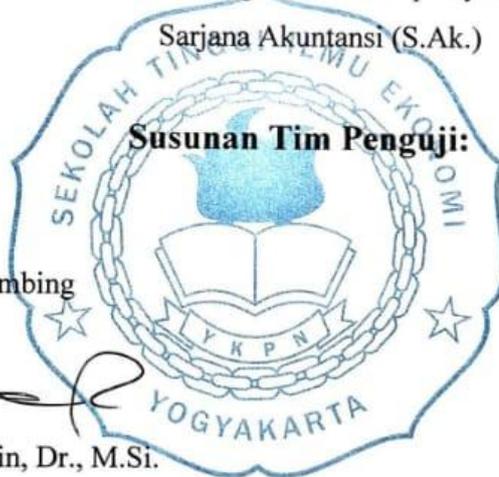
telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 6 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing


Rudy Badrudin, Dr., M.Si.



Penguji


Algifari, Drs., M.Si.

Yogyakarta, 6 Juni 2022
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua




Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak adanya pandemi Covid-19 terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/ kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis dilakukan terhadap Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan dari semua komponennya yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *cluster sampling*. Data yang digunakan sebagai alat analisis adalah data Pendapatan Asli Daerah pada lima kabupaten/ kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata PAD kabupaten/ kota di DIY sebelum dan saat adanya pandemi Covid-19, dan terdapat perbedaan rata-rata PAD antara empat kabupaten dan satu kota di DIY sebelum dan saat adanya pandemi Covid-19.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pandemi Covid-19.

ABSTRACT

This study aims to determine the impact of the Covid-19 pandemic on Regency/ City Original Revenue in the Special Region of Yogyakarta. The analysis is carried out on Regional Original Income as a whole from all its components which include Regional Taxes, Regional Levies, Separated Regional Assets Management Results, and Other Legitimate Regional Original Income. The sample selection in this study used the cluster sampling method. The data used as an analytical tool is data on Regional Original Income in five regencies/cities in the Special Region of Yogyakarta from 2001 to 2021. The results show that there are differences in the average PAD of districts/cities in DIY before and during the Covid-19 pandemic. 19, and there is a difference in average PAD between four districts and one city in DIY before and during the Covid-19 pandemic.

Keywords: Regional Original Income, Covid-19 Pandemic.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan bagian yang melekat dan terintegrasi dengan pembangunan nasional yang memberikan peluang bagi pemda sebagai upaya dalam mengembangkan demokratisasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Berwulo, Masinambow, & Wauran, 2017). Dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan potensi daerah dengan meningkatkan kualitas sumber daya yang ada sehingga dapat memberikan tambahan kontribusi terhadap pendapatan daerah (Nurmalasari, Ismatullah, & Darsawati, 2020).

Pemda diberi kewenangan untuk menyelenggarakan dan melakukan pengaturan terhadap urusan rumah tangga daerahnya sendiri. Penyerahan wewenang ini biasa disebut sebagai otonomi daerah. Menurut (Berwulo, Masinambow, & Wauran, 2017), kebijakan otonomi daerah tersebut memberikan kesempatan bagi daerah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan bagi kepentingan masyarakat sehingga menciptakan kemandirian yang mendorong penyelenggaraan pemerintahan suatu daerah menjadi lebih baik. Otonomi daerah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintah membutuhkan pendapatan yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan dalam melaksanakan pembangunan. Selama pelaksanaan desentralisasi, pembiayaan diperoleh dari beberapa sumber diantaranya Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain Penerimaan yang Sah. Sumber utama dana daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan dari hasil pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah menjadi tolok ukur seberapa mandiri suatu daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerahnya, maka dapat dikatakan semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah tersebut, sehingga tiap-tiap daerah diharapkan untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Hal ini sesuai dengan ungkapan (Rawadani & Fidiana, 2018).

Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu elemen yang merujuk pada berhasil atau tidaknya daerah tersebut dalam melaksanakan otonomi daerah (Aji, Kirya, & Susila, 2018), sehingga Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber dana utama (Sabuna, Kellen, & Libing, 2022) anggaran keuangan pemerintah daerah. Mengingat Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, tuntutan yang dibebankan kepada daerah juga mengalami peningkatan. PAD akan sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini yang mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan kemandirian di lingkungan daerahnya.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sangat berdampak pada perekonomian berbagai negara, begitu pula Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan ada dua orang yang positif terinfeksi virus

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Covid-19. Kemudian WHO (*World Health Organization*) menetapkan tanggal 11 Maret 2020 menjadi hari pandemi dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yaitu dengan menghentikan seluruh kegiatan di luar ruangan.

Adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia telah menimbulkan banyak kekacauan karena bukan hanya kesehatan masyarakat yang perlu perhatian lebih dari pemerintah, namun perekonomian Indonesia juga menjadi tidak terarah (Dede, Indrihastuti, & Sulistyowaty, 2021). Pandemi global ini tidak hanya berdampak pada perekonomian di pemerintah pusat, namun juga berdampak terhadap perekonomian pemerintah daerah, salah satunya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terhitung sudah ribuan penduduk di DIY yang terinfeksi virus Covid-19 bahkan menyebabkan ratusan orang dinyatakan meninggal dunia. Berbagai pembatasan yang diterapkan dalam rangka mengurangi penularan virus ini akhirnya berpengaruh terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi di mana perekonomian di DIY mengalami penurunan sampai dengan 2,69 persen hingga akhir tahun 2020 (BPS, 2021).

Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang dituliskan, maka masalah yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Apakah terdapat perbedaan rata-rata Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dan saat Pandemi Covid-19?
2. Apakah terdapat perbedaan rata-rata Pendapatan Asli Daerah antara 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dan saat Pandemi Covid-19?

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat perbedaan rata-rata Pendapatan Asli Daerah kabupaten/ kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dan saat Pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat perbedaan rata-rata Pendapatan Asli Daerah antara 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dan saat Pandemi Covid-19.

Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai komponen APBD khususnya dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan utamanya, serta diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi tambahan sumber referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat berkaitan dengan pentingnya peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap perekonomian khususnya perekonomian daerah sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendukung tercapainya pembangunan daerah termasuk berbagai kebijakan di dalamnya guna meningkatkan PAD.

3. Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada pemerintah daerah mengenai dampak Pandemi Covid-19 yang terjadi sehingga pemerintah daerah mampu mengambil kebijakan yang tepat untuk menstabilkan Pendapatan Asli Daerahnya agar tidak terus mengalami penurunan jika pandemi ini masih terus terjadi di tahun-tahun berikutnya.

Kontribusi Penelitian

Penelitian ini menganalisis mengenai rata-rata Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan pada kabupaten/ kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian dari salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah seperti pajak daerah dan/ atau retribusi daerah di satu kabupaten/ kota maupun di satu provinsi. Menurut pengetahuan peneliti, belum ada penelitian sebelumnya yang melakukan analisis mengenai perbedaan Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan dari semua komponennya di satu provinsi khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai perbedaan Pendapatan Asli Daerah setelah adanya pandemi global Covid-19 di Indonesia sehingga dapat menjadi pedoman bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam mengambil suatu kebijakan dalam rangka meminimalisir menurunnya Pendapatan Asli Daerah di masa yang akan datang jika Pandemi Covid-19 masih terjadi di tanah air.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tinjauan Teori

Teori Agensi

Teori agensi merupakan teori yang berfokus dan melekat pada dua individu yang disebut sebagai agen dan prinsipal. Agen dan prinsipal diasumsikan sebagai orang ekonom yang termotivasi untuk mengedepankan kepentingan pribadinya masing-masing. Terdapat hubungan keagenan dalam pengelolaan pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah sebagai prinsipal dan masyarakat sebagai agen (Badrudin, 2017).

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga meningkat pula nilai barang dan jasa di suatu negara dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara berkaitan dan berkorelasi positif dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya, sehingga semakin baik perekonomian di suatu negara, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan rakyatnya.

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan instrumen untuk mendorong perekonomian suatu daerah maupun nasional melalui sistem keuangan yang lebih baik guna mempermudah pelaksanaan pembangunan daerah yang diharapkan dapat berpengaruh terhadap membaiknya perekonomian dengan terwujudnya masyarakat yang sejahtera (Badrudin, 2017).

Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk menyelenggarakan dan mengatur sendiri urusan daerahnya berkaitan dengan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga otonomi daerah biasa dikenal dengan istilah kemandirian suatu daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi seluruh penerimaan dan pengeluaran pemda di lingkup provinsi, kabupaten, maupun kota guna mencapai sasaran pembangunan selama satu tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan mendapat persetujuan dari DPRD yang dinyatakan dalam Peraturan Daerah (Badrudin, 2017).

Pendapatan Asli Daerah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah menggambarkan bagaimana kemampuan suatu daerah untuk membiayai dan melaksanakan urusan pemerintahan daerahnya sebagai faktor yang menentukan keberhasilan dalam melaksanakan otonomi daerah.

Kontribusi PAD dalam APBD

Sumber penerimaan pemerintah daerah yang tercermin dalam APBD salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Suatu daerah otonom dikatakan mampu melaksanakan kemandirian dalam pembangunan terletak pada kemampuannya untuk menggali potensi sumber keuangan daerahnya sendiri serta meminimalkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, sehingga Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber pendanaan utama dan memberikan kontribusi terbesar.

Pandemi Covid-19

Covid-19 adalah nama suatu penyakit yang penyebabnya adalah virus corona. Covid sendiri adalah kependekan dari *Corona Virus Disease-2019*. Virus ini menyerang saluran pernapasan hingga menyebabkan demam tinggi, flu dan batuk, sesak napas, nyeri pada tenggorokan, hingga hilangnya indra perasa dan indra penciuman pada pasien yang terinfeksi (Hadi, Eikman, & Amil, 2021).

Pengembangan Hipotesis

Perbedaan Rata-rata Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dilihat dari komponen perolehannya, adanya pandemi diperkirakan dapat mengganggu kestabilan perolehan Pendapatan Asli Daerah di beberapa provinsi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh (Ishak, 2021) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah pemerintah provinsi di Indonesia sebelum dan sesudah diumumkan pertama kalinya kasus Covid-19 di Indonesia. Berdasar uraian tersebut, hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

H1: Ada Perbedaan Rata-rata Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

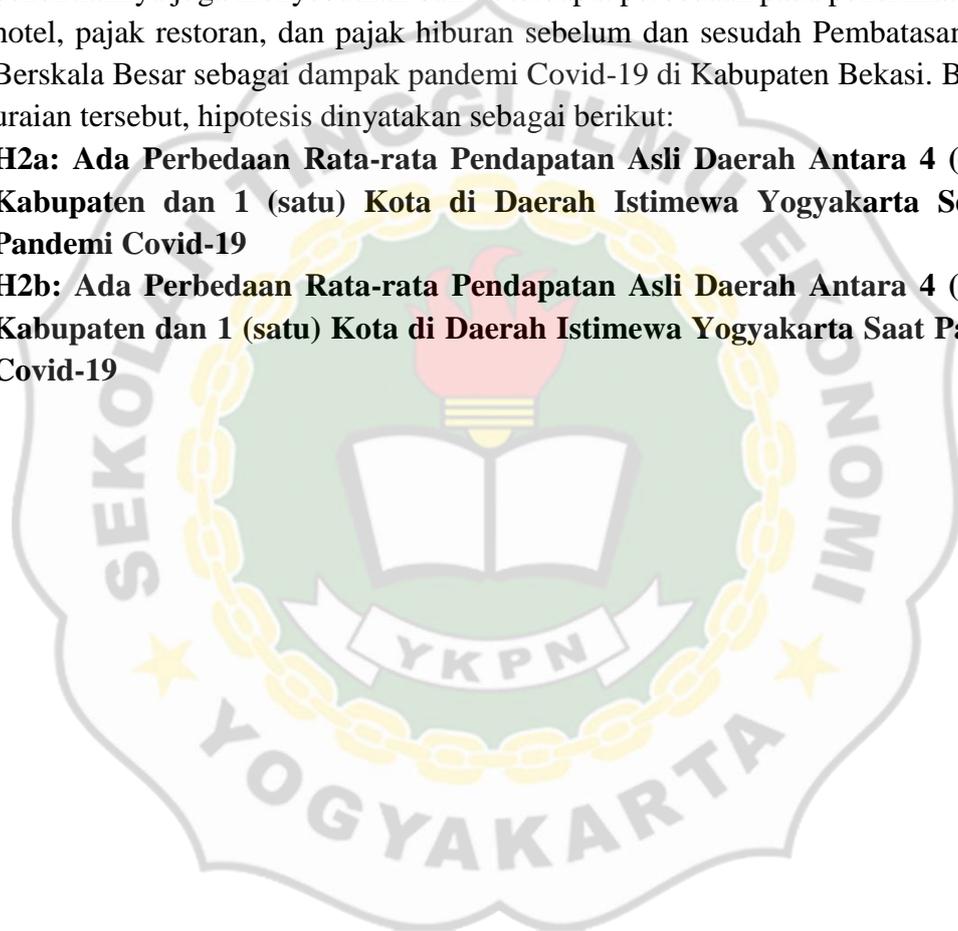
Perbedaan Rata-rata Pendapatan Asli Daerah Antara 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berbagai komponen Pendapatan Asli Daerah yang menjadi sumber utama pendapatan daerah diharapkan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun setelah adanya pandemi Covid-19, beberapa kabupaten dan/ atau kota di berbagai provinsi di Indonesia turut merasakan dampaknya. Penelitian oleh (Dede, Indrihastuti, & Sulistyowaty, 2021) mendapatkan hasil jika penerimaan PAD dari pajak hiburan Kota Batu mengalami penurunan sebesar 12,34% di tahun 2020 yaitu tahun pada saat pandemi Covid-19 melanda. (Sari & Siringoringo, 2021) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa terdapat perbedaan pada penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan sebelum dan sesudah Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai dampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Bekasi. Berdasar uraian tersebut, hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

H2a: Ada Perbedaan Rata-rata Pendapatan Asli Daerah Antara 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelum Pandemi Covid-19

H2b: Ada Perbedaan Rata-rata Pendapatan Asli Daerah Antara 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Saat Pandemi Covid-19



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu menganalisis apakah ada perbedaan rata-rata Pendapatan Asli Daerah sebelum dan saat adanya Pandemi Covid-19. Lokasi penelitian yaitu di seluruh kabupaten/ kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 21 tahun, yaitu sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2021. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Penelitian kuantitatif adalah proses untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan data yang berupa angka sebagai alat untuk menganalisis informasi berkaitan dengan apa yang hendak diketahui (Hidayat, 2012).

Sampel dan Data Penelitian

Sampel merupakan himpunan bagian dari populasi yang terdiri dari sejumlah elemen yang representatif atau yang dapat mewakili populasinya. Sampel dalam penelitian diambil dengan metode *cluster sampling* atau bisa disebut juga area sampling, yaitu teknik pengambilan sampel jika populasinya tidak terdiri dari individu-individu tetapi terdiri dari kelompok atau *cluster* (Hidayat, 2017). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah dari seluruh komponennya, pada lima kabupaten/ kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai tahun 2001 hingga tahun 2021.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data sekunder yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta berupa data Pendapatan Asli Daerah kabupaten/ kota di DIY dari seluruh komponen pendapatan asli daerah itu sendiri. Data tersebut diperoleh dari halaman website Kementerian Keuangan (<https://djpk.kemenkeu.go.id>) dan website Bappeda Provinsi DIY (<https://bappeda.jogjaprov.go.id>). Dalam penelitian ini juga dilengkapi data pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di DIY selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2021, yang diperoleh dari halaman website Badan Pusat Statistik, yaitu BPS Kabupaten Sleman (<https://slemankab.bps.go.id>), BPS Kabupaten Bantul (<https://bantulkab.bps.go.id>), BPS Kabupaten Kulon Progo (<https://kulonprogokab.bps.go.id>), BPS Kabupaten Gunungkidul (<https://gunungkidulkab.bps.go.id>), dan BPS Kota Yogyakarta (<https://jogjakota.bps.go.id>).

Jenis dan Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah suatu karakter, sifat atau nilai dari individu, serta objek ataupun kegiatan bervariasi untuk dipelajari dan disimpulkan oleh seorang peneliti (Qothrunnada, 2021). Variabel pada penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah dengan seluruh komponennya yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah (Badrudin, 2017). Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota (Badrudin, 2017).

3. Retribusi Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu (Badrudin, 2017).

4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Badrudin (2017) menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah meliputi; bagian laba atas investasi modal pada organisasi milik daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bagian laba atas investasi modal pada organisasi milik pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan bagian laba atas investasi modal pada organisasi milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

5. Lain-lain PAD yang Sah

Badrudin (2017) menyatakan bahwa lain-lain PAD yang sah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah disediakan untuk menganggarkan pendapatan daerah yang tidak menjadi bagian dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Model Penelitian

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Varians (ANOVA), *Kruskal-Wallis Test* dan *Wilcoxon Rank-Sum Test*. Analisis Varians (ANOVA) merupakan salah satu alat analisis statistika yang digunakan untuk

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menguji hipotesis beda dua atau lebih rata-rata populasi dengan data berdistribusi normal. Analisis Varians terdiri dari *one-way anova* dan *two-way anova*. *One-way anova* adalah analisis yang menguji dugaan (hipotesis) beda lebih dari 2 (dua) rata-rata populasi menggunakan satu sumber perbedaan atau satu *treatment*. *Two-way anova* adalah analisis yang menguji dugaan (hipotesis) beda lebih dari 2 (dua) rata-rata populasi menggunakan dua sumber perbedaan atau dua *treatment*. *Kruskal-wallis test* adalah analisis yang menguji dugaan (hipotesis) beda lebih dari 2 (dua) rata-rata populasi di mana data yang digunakan adalah data yang tidak berdistribusi normal. *Wilcoxon Rank-Sum Test* adalah analisis yang menguji dugaan (hipotesis) beda dua rata-rata populasi sampel independen dengan data yang tidak berdistribusi normal.

Metode dan Teknik Analisis

1. Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif merupakan kegiatan mengumpulkan, mengolah, lalu menyajikan data observasi atau penelitian berupa ukuran, tabel, grafik, gambar, dan lain sebagainya untuk memudahkan pihak lain dalam memperoleh gambaran mengenai data tersebut (Algifari, 2016). Statistika deskriptif digunakan dalam penelitian ini agar dapat memberikan gambaran rinci mengenai data variabel seperti nilai terendah, nilai tertinggi, nilai rata-rata, standar deviasi, dan lain sebagainya.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji normal atau tidaknya data yang digunakan dalam penelitian, karena normal atau tidaknya data berpengaruh terhadap proses pengujian yang akan dilakukan selanjutnya. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *Liliefors*, *Shapiro Wilk*, dan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, karena sampel yang digunakan merupakan jenis sampel kecil yang berjumlah 5 (lima) sampel. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar daripada tingkat signifikansi 5%, maka data tersebut berdistribusi normal.

3. Uji Hipotesis

Analisis Varians Satu Arah (*One-Way Anova*)

Penelitian ini menggunakan uji hipotesis berupa Analisis Varians (ANOVA) untuk mengetahui perbedaan lebih dari dua rata-rata populasi dengan menggunakan satu sumber perbedaan atau *treatment* (Subiyakto & Algifari, 2011). Tingkat signifikansi yang digunakan untuk pengujian adalah 5%. Jika nilai signifikansi hasil pengujian dengan program SPSS lebih kecil daripada tingkat signifikansi yang ditetapkan, maka hipotesis (H_a) diterima atau ada perbedaan rata-rata pendapatan asli daerah kabupaten/ kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dan saat pandemi Covid-19.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Analisis Varians Dua Arah (*Two-Way Anova*)

Penelitian ini menggunakan uji hipotesis berupa Analisis Varians (ANOVA) untuk mengetahui perbedaan lebih dari dua rata-rata populasi dengan menggunakan dua sumber perbedaan atau *treatment* (Subiyakto & Algifari, 2011). Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%. Jika nilai signifikansi hasil pengujian dengan SPSS lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, maka hipotesis (H_a) diterima atau ada perbedaan rata-rata pendapatan asli daerah antara empat kabupaten dan satu kota di DIY sebelum dan saat pandemi Covid-19.

Wilcoxon-Rank Sum Test

Penelitian ini menggunakan alat uji hipotesis *Wilcoxon Rank-Sum Test* untuk mengetahui perbedaan lebih dari dua rata-rata populasi sampel independen, namun data yang digunakan adalah data yang tidak berdistribusi normal. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5%. Jika nilai signifikansi hasil pengujian lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, maka hipotesis (H_a) diterima atau ada perbedaan rata-rata pendapatan asli daerah kabupaten/ kota di DIY sebelum dan saat pandemi Covid-19.

Kruskal-Wallis Test

Penelitian ini menggunakan alat uji hipotesis *Kruskal-wallis Test* untuk mengetahui perbedaan lebih dari dua rata-rata populasi dengan data yang tidak berdistribusi normal. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5%. Jika nilai signifikansi hasil pengujian lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, maka hipotesis (H_a) diterima atau ada perbedaan rata-rata pendapatan asli daerah antara empat kabupaten dan satu kota di DIY sebelum dan saat pandemi Covid-19.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan lima sampel yang terdiri dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta. Masing-masing sampel memiliki pendapatan asli daerah yang dipublikasikan pada website Kementerian Keuangan (<https://dpjk.kemenkeu.go.id>) dan website Bappeda Provinsi DIY (<https://bappeda.jogjaprovo.go.id>) yang akan digunakan sebagai indikator untuk mengetahui perbedaan rata-rata pendapatan asli daerah di kabupaten/ kota di DIY tersebut sebelum dan saat adanya Pandemi Covid-19.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistika Deskriptif (Dalam Jutaan)					
Variabel	Jumlah Data	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
PAD	105	8.852	972.050	223.562	235.455
PD	30	31.394	650.085	241.613	196.275
RD	30	7.341	57.633	30.578	13.881
HPKDD	30	12.652	47.566	23.452	10.043
LPADS	30	118.285	276.911	177.333	40.775

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/ kota di DIY yang nilainya minimum sebesar Rp8.852.000.000 adalah PAD Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2001, dan nilai maksimum sebesar Rp972.050.000.000 adalah PAD Kabupaten Sleman pada tahun 2019. Pendapatan Asli Daerah memiliki rata-rata sebesar Rp223.562.000.000 dan standar deviasi sebesar Rp235.455.000.000.

Pajak Daerah (PD) kabupaten/ kota di DIY yang bernilai minimum sebesar Rp31.394.000.000 adalah Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016, sedangkan yang nilainya maksimum sebesar Rp650.085.000.000 adalah Pajak Daerah yang diperoleh kembali oleh Kabupaten Sleman pada tahun 2019. Pajak Daerah memiliki nilai rata-rata sebesar Rp241.613.000.000 dan standar deviasi sebesar Rp196.275.000.000.

Retribusi Daerah (RD) kabupaten/ kota di DIY yang bernilai minimum sebesar Rp7.341.000.000 adalah Retribusi Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017, sedangkan nilai maksimum sebesar Rp57.633.000.000 lagi-lagi diperoleh oleh Kabupaten Sleman pada tahun 2019. Retribusi Daerah memiliki nilai rata-rata sebesar Rp30.578.000.000 dan nilai standar deviasi sebesar Rp13.881.000.000.

Nilai minimum Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDD) kabupaten/ kota di DIY sebesar Rp12.652.000.000 merupakan HPKDD yang diperoleh oleh Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2020. Nilai maksimum HPKDD sebesar Rp47.566.000.000 diperoleh kembali oleh Kabupaten Sleman

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

namun pada tahun 2020. HPKDD memiliki nilai rata-rata sebesar Rp23.452.000.000 dan standar deviasi sebesar Rp10.043.000.000.

Variabel lainnya yaitu Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LPADS) yang memiliki nilai minimum sebesar Rp118.285.000.000 adalah LPADS milik Kabupaten Bantul pada tahun 2021, sedangkan nilai maksimum sebesar Rp276.911.000.000 juga diperoleh oleh Kabupaten Bantul pada tahun 2017. LPADS memiliki nilai rata-rata sebesar Rp177.333.000.000 dan standar deviasi sebesar Rp40.775.000.000.

Uji Normalitas

Uji Normalitas			
Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed)		
	Liliefors	Shapiro Wilk	One-Sample Kolmogorov Smirnov
PAD	0,000	0,000	0,002
PAD Sebelum Pandemi	0,000	0,000	0,001
PAD Saat Pandemi	0,200	0,095	0,743

Hasil pengujian sesuai dengan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan memiliki nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000 dari uji *liliefors*, 0,000 dari uji *shapiro wilk*, dan 0,002 dari uji *one-sample kolmogorov smirnov test*, ketiga hasil pengujian tersebut menunjukkan nilai *asymp. sig.* yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($0,000; 0,000; 0,002 < 0,05$) yang artinya data Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan tidak berdistribusi normal.

Hasil uji normalitas data PAD sebelum pandemi memiliki nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000 dari uji *liliefors*, 0,000 dari uji *shapiro wilk*, dan 0,001 dari uji *one-sample kolmogorov smirnov test*. Ketiga hasil pengujian tersebut menunjukkan nilai *asymp. sig.* yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% ($0,000; 0,000; 0,001 < 0,05$), artinya data PAD sebelum pandemi tidak berdistribusi normal.

Hasil uji normalitas data PAD saat pandemi memiliki nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 dari uji *liliefors*, 0,095 dari uji *shapiro wilk*, dan 0,743 dari uji *one-sample kolmogorov smirnov test*. Ketiga hasil pengujian tersebut menunjukkan nilai *asymp. sig.* yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% ($0,200; 0,095; 0,743 > 0,05$), artinya data PAD saat pandemi berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil tersebut, maka pengujian hipotesis akan dilakukan melalui kombinasi statistika parametrik untuk data berdistribusi normal dan statistika non parametrik untuk data yang tidak berdistribusi normal, yaitu dengan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

uji *Two-Way Anova Without Replication*, *Kruskal-Wallis Test* dan *Wilcoxon Rank-Sum Test*.

Uji Hipotesis

Analisis *Wilcoxon-Rank Sum Test*

Variabel	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	Hasil
PAD	0,001	Ada perbedaan rata-rata

Hasil pengujian sesuai dengan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai *Asymp. Sig.* sebesar 0,001, lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 5% ($0,001 < 0,05$), artinya ada perbedaan rata-rata pendapatan asli daerah kabupaten/ kota di DIY sebelum dan saat adanya pandemi Covid-19.

Analisis *Kruskal-Wallis Test*

Variabel	<i>Asymp. Sig.</i>	Hasil
PAD Sebelum Pandemi	0,008	Ada perbedaan rata-rata

Hasil pengujian sesuai dengan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah sebelum adanya pandemi Covid-19 memiliki nilai *Asymp. Sig.* sebesar 0,008, lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 5% ($0,008 < 0,05$), artinya ada perbedaan rata-rata pendapatan asli daerah antara empat kabupaten dan satu kota di DIY sebelum adanya pandemi Covid-19.

Analisis *Two-Way Anova*

<i>Uji Two-Way Anova Without Replication</i>		
Variabel	<i>P-value</i>	
	Kab-Kota	Tahun
PAD Saat Pandemi	0,000	0,479

Hasil pengujian sesuai tabel di atas menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah saat adanya pandemi Covid-19 memiliki nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000 dari perbedaan antar kabupaten kota di DIY. Hasil ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, maka berarti ada perbedaan rata-rata pendapatan asli daerah antar kabupaten kota di DIY selama masa pandemi Covid-19. Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* dari perbedaan tahun sebesar 0,479, lebih besar dari tingkat signifikansi 5%, artinya tidak ada perbedaan rata-rata pendapatan asli daerah pada masa pandemi, yaitu tahun 2020 dan 2021.

Pembahasan

Perbedaan Rata-rata Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil pengujian pada hipotesis pertama adalah ada perbedaan rata-rata pendapatan asli daerah kabupaten/ kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dan saat pandemi Covid-19. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji *wilcoxon rank-sum test* yang menunjukkan nilai *asympt. sig.* sebesar 0,001 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%.

Sebelum adanya pandemi Covid-19, kabupaten/ kota di DIY memiliki besaran nilai pendapatan asli daerah yang rata-rata berbeda di tiap kabupaten/ kota. Setiap kabupaten/ kota tersebut memperoleh pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing. Setelah adanya pandemi Covid-19, kabupaten/ kota di DIY mengalami penurunan pada perolehan PAD secara serentak di dua tahun terakhir saat masa pandemi Covid-19. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ishak, 2021) yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan pendapatan asli daerah pemerintah provinsi sebelum dan sesudah diumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia.

Penurunan perolehan pendapatan asli daerah di masa pandemi didominasi oleh turunnya perolehan retribusi daerah. Meskipun terdapat satu kabupaten yang mengalami kondisi berbeda, yaitu Kabupaten Kulon Progo di mana perolehan retribusi daerahnya rata-rata mengalami kenaikan sebesar 8% di dua tahun terakhir, yaitu tahun 2020 dan 2021, namun kabupaten/ kota lainnya serentak mengalami penurunan perolehan retribusi daerah di masa pandemi. Rata-rata penurunan tersebut sebesar 24% di Kabupaten Bantul, 17% di Kabupaten Gunungkidul, 16% di Kabupaten Sleman, dan 6% di Kota Yogyakarta. Penurunan retribusi daerah ini diakibatkan karena adanya kebijakan pemerintah untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DIY pada masa pandemi.

Perbedaan Rata-rata Pendapatan Asli Daerah Antara Empat Kabupaten dan Satu Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

Hasil pengujian pada hipotesis kedua adalah ada perbedaan rata-rata pendapatan asli daerah antara empat kabupaten dan satu kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dan saat pandemi Covid-19. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji *kruskal-wallis test* sebelum pandemi yang menunjukkan nilai *asympt. sig.* sebesar 0,008, lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan. Pengujian juga dilakukan dengan *two-way anova without replication* untuk data saat pandemi, yang menunjukkan nilai *P-value* sebesar 0,000 dari sumber perbedaan kabupaten kota, dan nilai *P-value* sebesar 0,479 dari sumber perbedaan tahun. *P-value* sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, artinya ada perbedaan rata-rata pendapatan asli daerah antar kabupaten kota pada masa pandemi Covid-19. *P-value* sebesar 0,479 lebih besar dari tingkat signifikansi 5%, artinya tidak ada perbedaan rata-rata pendapatan asli daerah pada masa pandemi Covid-19. Maka dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan rata-rata pendapatan asli daerah antara empat kabupaten dan satu

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kota di DIY sebelum dan saat pandemi Covid-19 bersumber dari perbedaan antar kabupaten/ kota, tidak bersumber dari perbedaan tahun.

Perbedaan rata-rata pendapatan asli daerah antar kabupaten kota di masa pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa terdapat usaha untuk melakukan inovasi dan pengembangan kreativitas yang berbeda oleh masing-masing daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan asli daerahnya selama masa pandemi. Tidak adanya perbedaan pendapatan asli daerah pada masa pandemi, yaitu tahun 2020 dan 2021 menunjukkan bahwa pandemi yang terjadi berdampak pada terganggunya perekonomian daerah, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga daerah yang inovatif akan lebih mampu meredam turunnya kinerja perekonomian daerahnya dari unsur pendapatan asli daerah

Penurunan perolehan PAD tersebut akibat menurunnya beberapa komponennya. Pajak daerah di empat kabupaten mengalami penurunan rata-rata sebesar 2%, dan untuk kota Yogyakarta sendiri mengalami penurunan dari pajak daerah rata-rata sebesar 8%. Selain pajak daerah, retribusi daerah di empat kabupaten dan satu kota di DIY juga mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid-19, di mana retribusi daerah di empat kabupaten di DIY rata-rata menurun sebesar 12% dan menurun rata-rata 6% di satu kota. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aji & Pratiwi, 2022) yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan pada penerimaan pajak daerah dari sektor pajak hotel dan pajak restoran sebelum dan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Yogyakarta pada tahun 2020.

Lain-lain PAD yang Sah juga termasuk komponen yang menyebabkan penurunan PAD di DIY, di mana pada masa pandemi Covid-19 terjadi penurunan rata-rata sebesar 8% di empat kabupaten dan 0,13% di satu kota. Hasil tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh (Ishak, 2021) bahwa kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai efek terhadap pendapatan asli daerah.

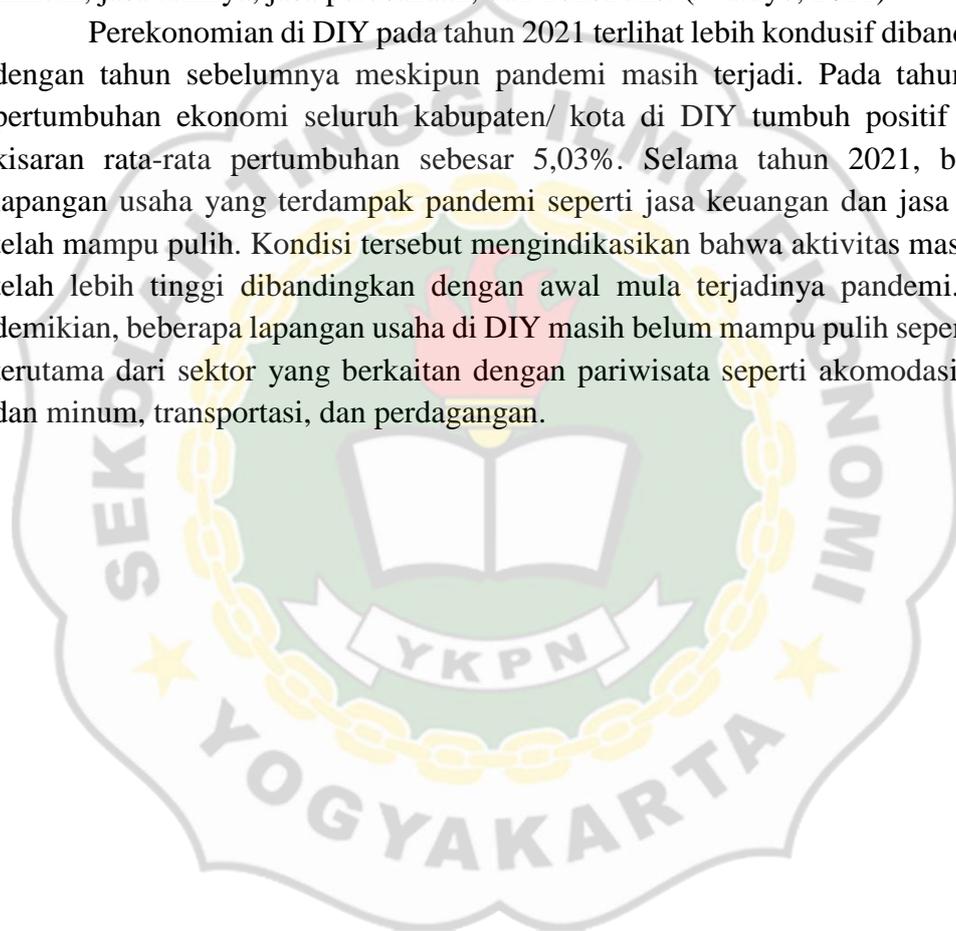
Komponen Pendapatan Asli Daerah lainnya yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu komponen PAD yang tidak terlalu terdampak oleh adanya pandemi. Hal tersebut dapat terlihat dari perolehan HPKDD di empat kabupaten yang rata-rata justru mengalami kenaikan di masa pandemi Covid-19 sebesar 4%, meskipun penurunan terjadi di Kota Yogyakarta sebesar 5%, namun dengan selisih yang tidak terlalu signifikan dapat dikatakan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bukan merupakan komponen yang mempengaruhi turunnya perolehan pendapatan asli daerah di masa pandemi. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh (Yuliana, Rukmi, Musata, & Ananta, 2021) yang menyebutkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan item dari pendapatan asli daerah yang tidak terdampak oleh pandemi Covid-19 di Kabupaten Sekadau.

Pandemi yang terjadi di tahun 2020 memberi pengaruh nyata terhadap perubahan struktur perekonomian DIY. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

minus baik di kabupaten maupun kota di DIY dengan rata-rata sebesar -2,5%. Widiastuti dan Silfiana (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 sangat berdampak di berbagai sektor kehidupan, terutama sektor ekonomi. Pulau Jawa merupakan salah satu yang terkena dampak karena adanya virus ini, di mana berbagai sektor ekonominya mengalami perlambatan bahkan berkontraksi cukup dalam. Kategori yang mengalami kontraksi di antaranya pada kategori usaha transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi makan dan minum, jasa lainnya, jasa perusahaan, dan konstruksi (Waluyo, 2021).

Perekonomian di DIY pada tahun 2021 terlihat lebih kondusif dibandingkan dengan tahun sebelumnya meskipun pandemi masih terjadi. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten/ kota di DIY tumbuh positif dengan kisaran rata-rata pertumbuhan sebesar 5,03%. Selama tahun 2021, beberapa lapangan usaha yang terdampak pandemi seperti jasa keuangan dan jasa lainnya telah mampu pulih. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas masyarakat telah lebih tinggi dibandingkan dengan awal mula terjadinya pandemi. Meski demikian, beberapa lapangan usaha di DIY masih belum mampu pulih sepenuhnya, terutama dari sektor yang berkaitan dengan pariwisata seperti akomodasi makan dan minum, transportasi, dan perdagangan.



SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap data pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat perbedaan rata-rata pendapatan asli daerah kabupaten/ kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dan saat adanya pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 menyebabkan turunnya perolehan pendapatan asli daerah kabupaten/ kota di DIY.
2. Terdapat perbedaan rata-rata pendapatan asli daerah antara 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dan saat adanya pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 berdampak terhadap turunnya pendapatan asli daerah antara empat kabupaten dan satu kota di DIY dan mengganggu perekonomian DIY selama masa pandemi Covid-19.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu tidak dapat diketahui letak perbedaan rata-rata pendapatan asli daerah sebelum dan saat pandemi Covid-19 lebih spesifik ditunjukkan dari kabupaten/ kota yang mana saja, karena alat analisis yang digunakan dengan bantuan program SPSS 15 adalah statistika non parametrik, sehingga tidak ada menu yang dapat menunjukkan letak perbedaannya secara lebih khusus.

Saran

Berdasarkan hasil pada penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran di antaranya:

1. Bagi Pemda DIY
Dengan adanya penurunan perolehan PAD dari masing-masing kabupaten/ kota di DIY akibat adanya pandemi Covid-19, maka tiap kabupaten/ kota harus berusaha untuk melakukan inovasi dan tanggap untuk memanfaatkan peluang guna menstabilkan kembali perolehan pendapatan asli daerahnya masing-masing, dan mampu bangkit dari buruknya perekonomian selama masa pandemi Covid-19.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan membandingkan pendapatan asli daerah antar provinsi. Peneliti selanjutnya juga dapat mempeluas periode penelitian, tidak hanya membandingkan sebelum dan saat pandemi, namun dengan membandingkan sebelum pandemi, saat pandemi, dan pasca pandemi.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. W., & Pratiwi, D. I. (2022). Analisis Perbedaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Hotel dan Restoran Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Yogyakarta Tahun 2020. *Jurnal Economica*, 33-40.
- Aji, B. P., Kirya, I. K., & Susila, G. P. (2018). Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Manajemen*, 95-104.
- Algifari. (2016). *Statistika Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Arifah, D. A. (2012). Praktik Teori Agensi Pada Entitas Publik dan Non Publik. *Jurnal Prestasi*, 85-95.
- Arifiyanti, A., & Ardiyanto, M. D. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Setelah Adanya Pandemi Covid-19 di Kabupaten dan Kota Se-Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1-13.
- Assidikiyah, N., Marseto, & Sishadiyati. (2021). Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur (Sebelum dan Saat Terjadi Pandemi Covid-19). *Jambura Economic Education Journal*, 102-115.
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Berwulo, L. L., Masinambow, V. A., & Wauran, P. C. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22-33.
- BPS. (2021, April 28). *Analisis Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19*. Retrieved from BPS Provinsi DIY: <https://yogyakarta.bps.go.id>
- Dede, M. V., Indrihastuti, P., & Sulistyowaty, Y. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Potensi Pajak Hiburan dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Batu). *Jurnal Akuntansi*, 344-351.
- Dinata, G. (2013). Analisis Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan PAD Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, 1-15.
- F.Tumuli, K., Kawung, G. M., & Sumual, J. I. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 121-129.
- Firdayanti, F., & Hidayat, M. T. (2019). Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 49-66.
- Habibi, M. M. (2015). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/ Kabupaten. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 117-124.
- Hadi, S., Eikman, A., & Amil. (2021). Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid 19 Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1553-1562.
- Hertati, L., Puspitawati, L., Gantino, R., & Ilyas, M. (2021). Dampak Retribusi Daerah, Peran Sistem Informasi Akuntansi pada Pendapatan Asli Daerah di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 518-532.
- Hidayat, A. (2012). *Tujuan, Jenis-jenis, Pengertian, dan Contoh Penelitian Kuantitatif*. Retrieved from Statistikian: <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kuantitatif.html>
- Hidayat, A. (2017). *Teknik Sampling dalam Penelitian*. Retrieved from Statistikian : <https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html>
- Ichwan, R., Rahman, B., & Maisyuri. (2017). Analisis Perbedaan PAD Kabupaten Aceh Utara Sebelum dan Setelah Pemekaran Dengan Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*, 77-85.
- Ishak, J. F. (2021). Analisis Determinan Pendapatan Asli Daerah. *Prosiding Snitt Poltekba*, 107-111.
- Ishak, J. F. (2021). Covid-19: Dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 587-591.
- Kisnayanti, N. P., Karmana, I. W., & Karma, I. G. (2021). Analysis Impact Of Covid-19 Pandemic On Hotel and Restaurant Tax Revenues In Badung Regency. *Jurnal Pajak Indonesia*, 217-223.
- Mulya, R., & Bustamam. (2016). Pengaruh Flypaper Effect pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2008-2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 190-198.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Otonomi Pembangunan*, 30-45.
- Nurmalasari, Ismatullah, I., & Darsawati, E. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan PAD. *Jurnal Proaksi*, 108-116.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Prass, A. B. (2022, Februari). *Tumbuh Mengesankan, Ekonomi DIY 2021 Tertinggi Se-Jawa*. Retrieved from krjogja.com: <https://www.krjogja.com>
- Purwaningsih, N., & Sunaningsih, S. N. (2021). Analisis Kontribusi Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 471-478.
- Qothrunnada, K. (2021). *Pengertian Variabel dan Jenisnya dalam Penelitian*. Retrieved from detikEdu: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5821887/pengertian-variabel-dan-jenisnya-dalam-penelitian>
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 37-46.
- Rawadani, A. R., & Fidiana. (2018). Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Sebelum dan Sesudah Sistem Pajak Online. *Jurnal Ekonomi*, 272-289.
- Sabuna, A., Kellen, P. B., & Libing, Z. S. (2022). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Wilayah (PAD) dari Sektor Pajak Hotel dan Rumah Makan di Kota Kupang. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 170-181.
- Sari, A. N., & Siringoringo, W. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 1855-1868.
- Sari, I. P., & Zamzami, F. (2021). *Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Retribusi Daerah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman*. Retrieved from Repository UGM: etd.repository.ugm.ac.id
- Subiyakto, H., & Algifari. (2011). *Praktikum Statistika dengan Ms Excel dan SPSS*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Syahputra, R. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 183-191.
- Waluyo. (2021). *Analisis Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19*. Daerah Istimewa Yogyakarta: BPS Provinsi DIY.
- Warjiyo, P. (2021). *Bangkit dan Optimis: Sinergi dan Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi*. Jakarta.
- Wattimena, Z. K., Septiyanti, M., & Mutiarin, D. (2021). Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah DIY Dalam Membangun Ketahanan Pangan di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 127-139.
- Widiastuti, A., & Silfiana. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa. *Jurnal Ekonomi-QU*, 97-107.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/ Kota Jawa Timur. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 465-472.

Yuliana, E. S., Rukmi, M. P., Musata, B., & Ananta, V. (2021). Pelaporan Total Pendapatan, PAD, dan Pendapatan Transfer Pemerintah di Era Pandemi Covid-19 (Studi Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Barat). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2347-2354.

